



Buruh Sulit Punya Rumah

MPBI Tolak Besaran UMP DIY 2024

Harga kredit rumah terlalu mahal untuk bisa dicicil dengan UMP DIY.

YOGYA, TRIBUN - Pemda DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 sebesar Rp2.125.897,61. Jumlah itu naik 7,27 persen atau Rp144.115,22 dari UMP tahun 2023 yang sebesar Rp1.981.782,39. Menanggapi hal tersebut, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak besaran UMP DIY tahun 2024 yang baru saja ditetapkan.

"Menolak dengan tegas penetapan UMP DIY tahun 2024. Menyatakan prihatin atas masih berlangsungnya upah murah di provinsi Istimewa,

● ke halaman 11

Buruh Sulit

● Sambungan Hal 1

serta mendesak Gubernur DIY untuk merevisi UMP DIY di angka Rp3,7 juta-Rp4 juta," tegas koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan.

Menurutnya, kenaikan upah buruh yang tak signifikan tidak akan mampu menjawab persoalan klasik DIY, yaitu kemiskinan dan ketimpangan. Terlebih, basis kenaikan UMP yang baru saja ditetapkan, tidak selaras dengan pernyataan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang mengatakan untuk menjadi negara maju, upah buruh di angka Rp10 juta.

Dengan UMP yang masih saja di bawah Rp 2,5 juta, lanjut Irsad, maka Indonesia dan Yogyakarta yang berpredikat maju bagaikan mimpi di siang bolong. "Dengan upah minimum provinsi 2024 yang di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL), maka masalah ketidakmampuan mengakses makanan bergizi berpotensi kembali berulang. Diberitakan sebelumnya oleh media massa, 50 persen penduduk Indonesia dan juga Yogyakarta tidak mampu mengakses makanan bergizi," terangnya.

Selain itu, dengan kenaikan UMP yang tak signifikan ini, buruh di Yogyakarta tetap dalam ancaman tunawisma karena tidak dapat membeli rumah. Harga kredit rumah terlalu mahal untuk bisa dicicil dengan UMP DIY. "Kenaikan UMP yang sangat tidak membantu buruh ini juga tidak bermakna positif bagi pertumbuhan ekonomi. Sebab, dengan upah yang murah, buruh DIY tidak

mempunyai daya beli yang tinggi. Buruh juga tidak akan membayar pajak lebih tinggi atas konsumsi/pengeluaran mereka," lanjut Irsyad.

"Terakhir, dengan tidak ada kenaikan UMP yang istimewa, maka tidak ada kejutan dan hadiah bagi buruh menjelang pemilu. Sehingga istilah Pemilu adalah pesta demokrasi menjadi tidak relevan. Karena produk kebijakan pengupahan hasil Pemilu tetap berorientasi upah murah. Deklarasi Pemilu Damai 2024 yang juga baru saja dilaksanakan pada akhirnya tidak terasa kebermanfaatannya bagi buruh," tandas Irsyad.

Harapan

Ketua Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kulon Progo, Taufik Riko, berharap kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 bisa mencapai 8 persen. "Kenaikan 8 persen ini masih logis, meski kami berharap kenaikannya bisa antara 10 sampai 15 persen," jelasnya, Rabu (22/11).

Harapan kenaikan 8 persen ini juga sejalan dengan nominal UMP DIY 2024 yang ditetapkan pada Selasa (21/11). Nominalnya sebesar Rp2.125.897,61 atau naik 7,27 persen dibandingkan UMP 2023. Taufik menilai kenaikan UMK 2024 harus mempertimbangkan berbagai hal. Seperti apakah kenaikannya sudah sesuai dengan tingkat inflasi hingga KHL. "Jadi tidak sekadar naik, tapi juga harus dilihat berapa (persen) kenaikannya," jelas Ketua Serikat Pekerja Bank Kulon Progo ini.

Jika kenaikan 8 persen terealisasi, Taufik berharap besaran UMK 2024 bisa meningkatkan kesejahteraan buruh hingga iklim investasi di Kulon Progo. Pada akhirnya ekonomi pun tumbuh.

Menurut rencana, Rapat Pleno Dewan Pengupahan akan digelar pada Kamis (23/11) pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo. "Kami selalu unsur buruh akan berjuang semaksimal mungkin agar harapan kami bisa tercapai," ujar Taufik.

Sebagai informasi, UMK Kulon Progo 2023 adalah Rp2.050.477,00, naik 7 persen dari UMK tahun 2022. Rata-rata kenaikan UMK Kulon Progo di kisaran 7 persen setiap tahunnya, namun bersifat fluktuatif.

Sementara itu, sejumlah pekerja di Bantul mengusulkan kenaikan UMK 2024 sebesar 7,26 persen atau setara Rp150.023. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bantul, Fardhanatun, kepada *Tribun Jogja*, Rabu (22/11). Artinya, UMK Bantul 2024 akan menyentuh angka Rp2.216.462. Sedangkan UMK tahun sebelumnya Rp2.066.438.

Usulan tersebut diambil berdasarkan formula perhitungan UMK Bantul. "Jadi, besaran kenaikan UMK 2024 itu menurut saya sudah sesuai harapan. Apalagi, adanya perhitungan inflasi yang telah dirasionalisasi sebesar 5,7 persen. Padahal, angka inflasi DIY *year on year* sebesar 3,31 persen," jelasnya. (han/ab/nei)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005